

**LAPORAN KINERJA PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan : Penunjang Urusan

OPD Pelaksanaan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	Program / Kegiatan	Belanja (Rp.)		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547,218,750	485,831,065	88.78
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93,600,000	86,375,265	92.28
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62,400,000	62,400,000	100.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37,033,300	36,969,700	99.83
4	Penyediaan ATK	98,994,950	80,489,800	81.31
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80,081,700	64,160,000	80.12
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	14,466,300	14,341,300	99.14
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU	4,500,000	4,470,000	99.33
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	25,767,500	25,685,000	99.68
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	44,775,000	44,065,000	98.41
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	85,600,000	66,875,000	78.13
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	449,204,500	426,663,993	94.98
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	148,950,000	148,950,000	100.00
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	20,250,000	20,250,000	100
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	124,050,000	123,350,000	99.44
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	140,225,000	123,118,993	87.80

	15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15,729,500	10,995,000	69.90
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur				
	16	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan	25,000,000	24,514,756	98.06
	17	Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah	142,444,800	141,829,800	99.57
4.	Program Pengembangan Data/Informasi		31,000,000	19,788,500	63.83
	18	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	31,000,000	19,788,500	63.83
5	Program Pendidikan Kedinasan		2,202,309,713	2,186,633,026	99.29
	19	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	144,678,667	141,160,950	97.57
	20	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV	471,981,500	468,250,600	99.21
	21	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS	1,585,649,546	1,577,221,476	99.47
6	Program Pembinaan dan Pengembangan		1,234,750,744	1,001,348,673	81.10
	22	Seleksi Penerimaan CPNS	277,892,254	150,951,840	54.32
	23	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	96,525,000	55,947,005	57.96
	24	Penyusunan Formasi PNS	36,450,000	16,371,700	44.92
	25	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	37,410,000	36,215,000	96.81
	26	Pengelolaan ADM Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	22,075,000	19,424,719	87.99
	27	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai	16,037,500	15,088,456	94.08
	28	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	20,975,000	15,248,050	72.70
	29	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK	32,700,000	31,175,610	95.34
	30	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	80,454,650	65,209,650	81.05
	31	Pengkoreksian Angka Kredit	18,039,100	16,539,000	91.68
	32	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar	49,275,000	48,975,000	99.39
	33	Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS	26,450,000	25,781,250	97.47

34	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	37,555,000	36,805,700	98.00
35	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	193,722,500	191,417,293	98.81
36	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan	34,860,000	27,677,955	79.40
37	Pembekalan Pasangan Pra Nikah	10,913,150	7,470,650	68.46
38	Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN	68,750,000	68,317,500	99.37
39	Penilaian Evaluasi Kinerja	19,435,000	19,267,050	99.14
40	Pengelolaan Tata Naskah Dinas	62,490,000	60,921,000	97.49
41	Pembekalan ASN yang memasuki purnabakti	69,740,600	69,557,400	99.74
42	Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2018	23,000,990	22,986,845	99.94

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Keluaran :
Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Hasil :
Terbayarnya jasa telpon, air dan listrik
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Hasil :
Bersih dan nyamannya suasana kantor
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Keluaran :
Tersedianya pembayaran/honorarium tenaga administrasi keuangan BKPSDM
Hasil :
Lancarnya jasa administrasi keuangan
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Keluaran :
Terbayarnya jasa petugas kebersihan
Hasil :
Bersih dan nyamannya suasana kantor
Target Kinerja : 100 %
Realisasi Kinerja : 100 %
- 5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : Penyediaan ATK
Keluaran :
Tersedianya alat tulis kantor

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Keluaran :

Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Hasil :

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

8. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan dan perUU

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

9. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran :

Tersedianya makanan dan minuman untuk operasional BKPSDM selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya makan dan miunm pegawai dan tamu kantor selama 12 bulan

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

10. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

11. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Keluaran :

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dengan instansi terkait selama 12 bulan

Hasil :

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

12. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran :

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Hasil :

Lancarnya Administrasi Perkantoran

Target Kinerja : 6 jenis

Realisasi Kinerja : 6 jenis

13. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Keluaran :

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

Hasil :

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Target Kinerja : 2 unit

Realisasi Kinerja : 2 unit

14. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran :

Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan

Hasil :

Adanya ruang rapat dan taman kantor yang representatif

Target Kinerja : 3 jenis

Realisasi Kinerja : 3 jenis

15. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran :

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

Hasil :

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

Target Kinerja : 12 bulan

Realisasi Kinerja : 12 bulan

16. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keluaran :

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

Hasil :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor.

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

17. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan : Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan Kursus

Hasil :

Meningkatnya kompetensi PNS

Target Kinerja : 5 orang

Realisasi Kinerja : 5 orang

18. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan : Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil :

Diterimanya sertifikat diklat

Target Kinerja : 30 orang

Realisasi Kinerja : 30 orang

19. Program : Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Keluaran :

Informasi pembangunan yang telah dipublikasikan

Hasil :

Tersebarnya informasi di lingkungan BKPSDM

Target Kinerja : 12 bulan

Realisasi Kinerja : 12 bulan

20. Program : Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur

Hasil :

Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur

Target Kinerja : PIM TK. III (4 org),

Realisasi Kinerja : PIM TK. III (4 org)

21. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan PIM Tk. IV

Hasil :

Diterimanya sertifikat diklat PIM Tk. IV

Target Kinerja : 30 orang

Realisasi Kinerja : 30 orang

22. Program : Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Prajabatan.

Hasil :

Keluarnya Sertifikat Diklat Prajabatan untuk PNS Yang Mengikuti Diklat.

Target Kinerja : 251 orang

Realisasi Kinerja : 251 orang

23. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Seleksi penerimaan CPNS

Keluaran :

Jumlah pelamar yang diterima sebagai CPNS

Hasil :

Bertambahnya PNS Kab. Pesisir Selatan

Target Kinerja : 159 orang

Realisasi Kinerja : 172 orang

24. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Keluaran :
Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Hasil :
Terbayarnya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada PNS
Target Kinerja : 5 orang
Realisasi Kinerja : 6 orang
25. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Penyusunan Formasi PNS
Keluaran :
Jumlah formasi yang diusulkan
Hasil :
Tercapainya penyusunan formasi
Target Kinerja : 215 orang
Realisasi Kinerja : 210 orang
26. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pemakaian Gelar
Keluaran :
Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar
Hasil :
PNS menerima SK Kenaikan Pangkat
Target Kinerja : 1400 berkas
Realisasi Kinerja : 1221 berkas
27. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai
Keluaran :
Jumlah PNS yang melakukan mutasi pindah dan mutasi jabatan (fungsional dan struktural)
Hasil :
Diterimanya SK definitif
Target Kinerja : 400 PNS
Realisasi Kinerja : 482 PNS
28. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Pengelolaan Adm Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen
Keluaran :
Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen

Hasil :

PNS mendapatkan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen

Target Kinerja : 100 berkas

Realisasi Kinerja : 129 berkas

29. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan

Keluaran :

Jumlah PNS yang melakukan sumpah dan pelantikan jabatan struktural PNS.

Hasil :

SK jabatan PNS yang dilantik.

Target Kinerja : 16 kali

Realisasi Kinerja : 19 kali

30. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan MPP

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim MPP

Hasil :

Keluarnya hasil keputusan disiplin terhadap kasus PNS

Target Kinerja : 8 kali sidang

Realisasi Kinerja : 8 kali sidang

31. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN

Keluaran :

Jumlah sidang yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja ASN

Hasil :

Terlaksananya mutasi PNS

Target Kinerja : 16 kali sidang

Realisasi Kinerja : 19 kali sidang

32. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan pensiun BUP, janda/duda dan APS

Hasil :

SK pensiun PNS

Target Kinerja : 215 berkas

Realisasi Kinerja : 212 berkas

33. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pengelolaan SIMPEG dan SAPK

Keluaran :

Jumlah data PNS yang diupdate dalam jaringan database

Hasil :

Tersimpannya data PNS di database untuk informasi kepegawaian

Target Kinerja : 2000 data

Realisasi Kinerja : 2000 data

34. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

**Kegiatan : Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian, dan
Pembinaan Kasus**

Keluaran :

Jumlah PNS yang melanggar disiplin, masalah perceraian dan kasus

Hasil :

Rekomendasi yang diberikan bagi PNS yang melanggar disiplin, masalah perceraian dan kasus

Target Kinerja : 35 kasus

Realisasi Kinerja : 43 kasus

35. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2018

Keluaran :

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi

Hasil :

PNS mendapatkan pembekalan

Target Kinerja : 50 orang

Realisasi Kinerja : 50 orang

36. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Pembekalan Pasangan Pra Nikah

Keluaran :

Jumlah PNS yang pembekalan pra nikah

Hasil :

PNS mendapatkan pembekalan

Target Kinerja : 30 orang

Realisasi Kinerja : 29 orang

37. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : Penilaian Evaluasi Kinerja

Keluaran :

Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya

Hasil :

Mendapatkan hasil penilaian kinerja dari atasan

Target Kinerja : 1900 orang

Realisasi Kinerja : 1891 orang

38. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Pengadaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Keluaran :
Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Hasil :
PNS mendapatkan sertifikat ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Target Kinerja : 59 berkas
Realisasi Kinerja : 59 berkas
39. **Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**
Kegiatan : Pengelolaan Tata Naskah Dinas
Keluaran :
Jumlah arsip PNS yang ditata dan dikelola dengan rapi
Hasil :
Rapinya arsip PNS di lingkungan Kab. Pesisir Selatan
Target Kinerja : 2700 naskah
Realisasi Kinerja : 2700 naskah

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil menunggu ketetapan dari Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB Nomor 504 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diserahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 17 Oktober 2019 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang semula direncanakan selesai pada Tahun 2019, baru dapat dimulai bulan Oktober 2019. Sehingga pelaksanaannya ditunda menjadi bulan Januari s/d Maret 2020.
- b. Kegiatan Formasi PNS, yang semula direncanakan dilakukan sosialisasi untuk pembaharuan data e-formasi terhadap peta jabatan dan usulan formasi

Tahun 2020 melalui aplikasi yang akan dibuka pada Bulan September s.d November 2019. Namun sampai saat ini pembaharuan data pada aplikasi e-formasi masih belum dapat dilakukan karena masih terkunci oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan.

c. Kegiatan Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, permasalahan yang ditemukan adalah:

- Peserta yang direncanakan untuk mengikuti dan lulus seleksi pendidikan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sebanyak 5 orang, namun yang lulus seleksi hanya 1 (satu) orang.
- Biaya pendidikan An. Muhammad Kadri yang dianggarkan sebanyak 2 semester @ Rp. 10.000.000,-, namun terealisasi dalam 2 semester hanya Rp. 12.500.000,-
- Biaya bantuan hidup An. Muhammad Kadri yang direncanakan selama 12 bulan, ternyata yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada bulan Agustus 2019 (teralisasi hanya 8 bulan)
- Bantuan pendidikan dan penelitian untuk PNS yang mendapatkan Tugas Belajar diasumsikan akan melakukan penelitian pada Tahun 2019, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum melakukan penelitian/penyusunan skripsi.

d. Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- Kesulitan untuk menemukan alamat suami/istri dari PNS yang mengajukan izin perceraian, karena untuk dapat diberikan izin pereraian kedua belah pihak harus diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang komprehensif sehingga dengan tidak diketahui alamat suami/istri dari PNS tersebut pemeriksaan menjadi kurang komprehensif, bisa jadi keterangan hanya didapat dari sebelah pihak saja. (untuk itu solusi perlunya tim turun ke lapangan untuk mencari keberadaan istri atau suami/keluarga dari PNS yang engajukan perceraian tersebut)
- PNS yang diperiksa sering tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan oleh tim, karena menutupi kebohongan-kebohongan terkait masalah internal maupun eksternal yang menjadi pengganggu dalam rumah tangga.

Banyak dari PNS yang menjelaskan bahwa kesalahan dalam rumah tangga terjadi hanya dari pasangannya saja.

- Beberapa kepala perangkat daerah terindikasi menyembunyikan indisipliner/permasalahan disiplin PNS/bawahannya dikarenakan "rasa sosial" terhadap bawahannya.
 - Sulit untuk menemukan bukti pemeriksaan kasus untuk itu dibutuhkan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Pemeriksaan Kasus namun anggaran terbatas.
- e. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Penyesuaian Gelar, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- Ditemukannya keterlambatan yang sering terjadi dalam memasukkan bahan kenaikan pangkat dari beberapa OPD dan kecamatan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari beberapa OPD terkait, didapati kurang memahami tentang penghitungan angka kredit dan permasalahan kepegawaian
 - Kesulitan dalam mencapai target kenaikan pangkat dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksaan berkas oleh pihak Kanreg XII BKN Pekanbaru
- f. Kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- Sarana dan prasarana berupa lemari tempat penyimpanan berkas tata naskah dan map tata naskah masih belum memadai/mencukupi karena keterbatasan anggaran
 - Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata naskah kepegawaian
- g. Kegiatan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK dengan permasalahan sebagai berikut
- Aplikasi SIMPEG versi terbaru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam menyajikan informasi sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.
 - Perlu diadakan sosialisasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIMPEG versi terbaru
 - Masih kurang validnya data yang akan di input karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan update data.

Solusi :

1. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus.
2. Mengevaluasi lebih lanjut mengenai anggaran kegiatan agar bisa direalisasikan sebaik mungkin.
3. Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Painan, 17 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM**



Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

**DATA CAPAIAN MAKRO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Penunjang Urusan

OPD Pelaksanaan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	Urusan/Indikator	Satuan	Tahun		Ket
			2018	2019	
URUSAN : PENUNJANG URUSAN					
	Indikator :				
41	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	44.35	30	
42	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	35	35	
43	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	156	159	
44	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	orang	4865	5132	

A. URUSAN

Urusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah
PENUNJANG URUSAN

B. INDIKATOR

Indikator Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan
RPJMD 2016-2021 Kab. Pesisir Selatan adalah

Program Pembinaan dan Pengembangan

: % tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur).

Program Pendidikan Kedinasan

: 1. % pejabat struktural eselon II & III yang telah mengikuti diklat pim II & III.
2. % pejabat struktural eselon IV yang telah mengikuti diklat pim IV.

Program Peningkatan Kapasitas Kepegawaian

: Jumlah pegawai ASN yang mengikuti diklat dan bimtek teknis/fungsional

Painan, 17 Januari 2020
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003



1. SKPD Pelaksanaan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Usuran yang dilaksanakan :

1. Penunjang urusan pemerintah daerah

URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Program dan Kegiatan (Jumlah Program sebanyak 6 program dan Kegiatan sebanyak 39 kegiatan)

Rincian Program dan Kegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					BELANJA LANGSUNG					REALISASI				TINGKAT CAPAIAN (%)
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN	BELANJA MODAL	TOTAL 7=(3+4+5+6)	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN	BELANJA MODAL	TOTAL 12=(8+9+10+11)					
1	2 URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13				
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,400,000	458,818,750	-	-	547,218,750	88,400,000	397,431,065	-	-	485,831,065	88.78				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		93,600,000			93,600,000		86,375,265			86,375,265	92.28				
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	62,400,000				62,400,000	62,400,000				62,400,000	100.00				
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,000,000	11,033,300			37,033,300	26,000,000	10,969,700			36,969,700	99.83				
4	Penyediaan ATK		98,994,950			98,994,950		80,489,800			80,489,800	81.31				
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		80,081,700			80,081,700		64,160,000			64,160,000	80.12				
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		14,466,300			14,466,300		14,341,300			14,341,300	99.14				
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU		4,500,000		-	4,500,000		4,470,000		-	4,470,000	99.33				
8	Penyediaan Makanan dan Minuman		25,767,500			25,767,500		25,685,000			25,685,000	99.68				
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		44,775,000			44,775,000		44,065,000			44,065,000	98.41				
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		85,600,000			85,600,000		66,875,000			66,875,000	78.13				
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51,300,000	92,354,500	14,600,000	290,950,000	449,204,500	48,650,000	77,418,993	9,895,000	290,700,000	426,663,993	94.98				
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-			148,950,000	148,950,000	-			148,950,000	148,950,000	100.00				
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				20,250,000	20,250,000				20,250,000	20,250,000	100.00				

USAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
	ANGGARAN					REALISASI					
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN	BELANJA MODAL	TOTAL	
2	3	4	5	6	7={3+4+5+6}	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
araan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2,300,000			121,750,000	124,050,000	1,850,000			121,500,000	123,350,000	99.44
araan Rutin/Barkala Kendaraan perasional	49,000,000	91,225,000	-		140,225,000	46,800,000	76,318,993	-		123,118,993	87.80
araan Rutin/Berkala Peralatan Gedung		1,129,500	14,600,000		15,729,500		1,100,000	9,895,000		10,995,000	69.90
n Peningkatan Kapasitas Sumber aratur	6,000,000	161,444,800	-	-	167,444,800	6,000,000	160,344,556	-	-	166,344,556	99.34
ng Bimtek dan Kursus Keterampilan		25,000,000			25,000,000		24,514,756			24,514,756	98.06
engelolaan Keuangan Daerah	6,000,000	136,444,800			142,444,800	6,000,000	135,829,800			141,829,800	99.57
n Pengembangan data/informasi	-	31,000,000	-	-	31,000,000	-	19,788,500	-	-	19,788,500	63.83
erluasan informasi pembangunan		31,000,000			31,000,000		19,788,500			19,788,500	63.83
n Pendidikan Kedinasan	23,400,000	2,178,909,713	-	-	2,202,309,713	18,550,000	2,168,083,026	-	-	2,186,633,026	99.29
tatan Keterampilan dan nalisme	9,000,000	135,678,667			144,678,667	9,000,000	132,160,950			141,160,950	97.57
kan dan Pelatihan PIM TK. IV	9,000,000	462,981,500			471,981,500	9,000,000	459,250,600			468,250,600	99.21
kan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi	5,400,000	1,580,249,546			1,585,649,546	550,000	1,576,671,476			1,577,221,476	99.47
n Pembinaan dan Pengembangan	257,700,000	808,816,394	-	-	1,066,516,394	254,600,000	595,442,623	-	-	850,042,623	79.70
enerimaan CPNS	-	277,892,254			277,892,254	-	150,951,840			150,951,840	54.32
an Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan	16,800,000	79,725,000			96,525,000	16,800,000	39,147,005			55,947,005	57.96
nan Formasi PNS	6,000,000	30,450,000			36,450,000	6,000,000	10,371,700			16,371,700	44.92
ngaraan Majelis Pertimbangan	35,100,000	2,310,000			37,410,000	34,950,000	1,265,000			36,215,000	96.81
aan ADM Karpeg, Karis/karsu dan	6,000,000	16,075,000			22,075,000	6,000,000	13,424,719			19,424,719	87.99

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN	BELANJA MODAL	TOTAL 7=(3+4+5+6)	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN	BELANJA MODAL	TOTAL 12=(8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
27	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai		16,037,500			16,037,500	-	15,088,456			15,088,456	94.08
28	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	6,000,000	14,975,000			20,975,000	6,000,000	9,248,050			15,248,050	72.70
29	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK	13,200,000	19,500,000			32,700,000	13,200,000	17,975,610			31,175,610	95.34
30	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Pegawai dan Pemakaian Gelar PNS	14,400,000	34,875,000			49,275,000	14,400,000	34,575,000			48,975,000	
31	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin	6,000,000	20,450,000			26,450,000	6,000,000	19,781,250			25,781,250	97.47
32	Pengadaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	37,555,000			37,555,000	-	36,805,700			36,805,700	98.00
33	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	85,200,000	108,522,500			193,722,500	84,400,000	107,017,293			191,417,293	98.81
34	Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan		34,860,000			34,860,000		27,677,955			27,677,955	79.40
35	Kegiatan Pembekalan Pasangan Pra Nikah	3,000,000	7,913,150			10,913,150	1,200,000	6,270,650			7,470,650	68.46
36	Penyelenggaraan Tim Penilai Kinerja ASN	66,000,000	2,750,000			68,750,000	65,650,000	2,667,500			68,317,500	99.37
37	Penilaian Evaluasi Kinerja		19,435,000			19,435,000		19,267,050			19,267,050	99.14
38	Pengelolaan Tata Naskah Dinas		62,490,000			62,490,000		60,921,000			60,921,000	97.49
39	Sosialisasi Perka BKN No. 2 Tahun 2016	-	23,000,990			23,000,990	-	22,986,845			22,986,845	99.94
	TOTAL	426,800,000	3,731,344,157	14,600,000	290,950,000	4,463,694,157	416,200,000	3,418,508,763	9,895,000	290,700,000	4,135,303,763	92.64

B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial

Sampai dengan Tahun 2019, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan belum mempunyai standar pelayanan minimal.

C. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Pendidikan Kedinasan
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Seluruh program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu "Terwujudnya Manajemen ASN yang baik sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah", dengan sasaran sebagai:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
2. Meningkatnya manajemen system karir ASN berdasarkan Merit System
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM.

D. Kondisi Sarana Prasana yang digunakan

Pada saat ini kondisi sarana dan prasana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan lengkap.

E. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dari program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil menunggu ketetapan dari Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB Nomor 504 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang diserahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 17 Oktober 2019 dan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 yang semula direncanakan selesai pada Tahun 2019, baru dapat dimulai bulan Oktober 2019. Sehingga pelaksanaannya ditunda menjadi bulan Januari s/d Maret 2020.
2. Kegiatan Formasi PNS, yang semula direncanakan dilakukan sosialisasi untuk pembaharuan data e-formasi terhadap peta jabatan dan usulan formasi Tahun 2020 melalui aplikasi yang akan dibuka pada Bulan September s.d November 2019. Namun sampai saat ini pembaharuan data pada aplikasi e-formasi masih belum dapat dilakukan karena masih terkunci oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan.

3. Kegiatan Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, permasalahan yang ditemukan adalah:
 - a. Peserta yang direncanakan untuk mengikuti dan lulus seleksi pendidikan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS sebanyak 5 orang, namun yang lulus seleksi hanya 1 (satu) orang.
 - b. Biaya pendidikan An. Muhammad Kadri yang dianggarkan sebanyak 2 semester @ Rp. 10.000.000,-, namun terealisasi dalam 2 semester hanya Rp. 12.500.000,-
 - c. Biaya bantuan hidup An. Muhammad Kadri yang direncanakan selama 12 bulan, ternyata yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan pada bulan Agustus 2019 (teralisasi hanya 8 bulan)
 - d. Bantuan pendidikan dan penelitian untuk PNS yang mendapatkan Tugas Belajar diasumsikan akan melakukan penelitian pada Tahun 2019, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum melakukan penelitian/penyusunan skripsi.
4. Kegiatan Pemeriksaan Kasus PNS, Masalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin, memiliki permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kesulitan untuk menemukan alamat suami/istri dari PNS yang mengajukan izin perceraian, karena untuk dapat diberikan izin pereraian kedua belah pihak harus diperiksa terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang komprehensif sehingga dengan tidak diketahui alamat suami/istri dari PNS tersebut pemeriksaan menjadi kurang komprehensif, bisa jadi keterangan hanya didapat dari sebelah pihak saja. (untuk itu solusi perlunya tim turun ke lapangan untuk mencari keberadaan istri atau suami/keluarga dari PNS yang engajukan perceraian tersebut)
 - b. PNS yang diperiksa sering tidak kooperatif selama menjalani pemeriksaan oleh tim, karena menutupi kebohongan-kebohongan terkait masalah internal maupun eksternal yang menjadi pengganggu dalam rumah tangga. Banyak dari PNS yang menjelaskan bahwa kesalahan dalam rumah tangga terjadi hanya dari pasangannya saja.

- c. Beberapa kepala perangkat daerah terindikasi menyembunyikan indisipliner/permasalahan disiplin PNS/bawahannya dikarenakan "rasa sosial" terhadap bawahannya.
 - d. Sulit untuk menemukan bukti pemeriksaan kasus untuk itu dibutuhkan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Pemeriksaan Kasus namun anggaran terbatas.
5. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Penyesuaian Gelar, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- a. Ditemukannya keterlambatan yang sering terjadi dalam memasukkan bahan kenaikan pangkat dari beberapa OPD dan kecamatan
 - b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian dari beberapa OPD terkait, didapati kurang memahami tentang penghitungan angka kredit dan permasalahan kepegawaian
 - c. Kesulitan dalam mencapai target kenaikan pangkat dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksaan berkas oleh pihak Kanreg XII BKN Pekanbaru
6. Kegiatan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- a. Sarana dan prasarana berupa lemari tempat penyimpanan berkas tata naskah dan map tata naskah masih belum memadai/mencukupi karena keterbatasan anggaran
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata naskah kepegawaian
7. Kegiatan Pengelolaan SIMPEG dan SAPK dengan permasalahan sebagai berikut
- a. Aplikasi SIMPEG versi terbaru belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam menyajikan informasi sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.
 - b. Perlu diadakan sosialisasi dalam mengimplementasikan aplikasi SIMPEG versi terbaru
 - c. Masih kurang validnya data yang akan di input karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan update data.

Solusi :

1. Memperbaharui pengelolaan manajemen kepegawaian secara bertahap dan terus menerus.
2. Mengevaluasi lebih lanjut mengenai anggaran kegiatan agar bisa direalisasikan sebaik mungkin.
3. Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.